

Setelah adanya PPD sebaran pendapatan pemanfaat cukup merata. Untuk range Rp 800.000- Rp 1.149.000 ditemukan pada 2 responden (10%) dengan total nilai pendapatan Rp 1.750.000. Frekuensi terbanyak adalah pada range Rp 1.150.000 - Rp 1.499.000 yaitu sebanyak 6 responden (30%) dengan total nilai pendapatan Rp 7.800.000 (23,96%). Diikuti pada range Rp 1.500.000 - Rp 1.849.000 yaitu sebanyak 5 responden (25%) dengan total nilai pendapatan Rp 7.950.000 (24,42%). Sisanya 3 responden (15%) memiliki pendapatan lebih dari Rp 2.200.000. Sedangkan untuk non pemanfaat range pendapatan masih sama semuanya namun pada range yang berbeda dari sebelumnya yaitu Rp 800.000- Rp 1.149.000 dengan nilai pendapatan Rp 2.800.000.

Tabel 20. Pendapatan Bersih Pemanfaat dan Non Pemanfaat Sesudah PPD

Batas Kelas Pendapatan Bersih Setelah PPD (Rp)	Frekuensi (Responden)	Persentase (%)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
0 -449.000	0	0	0	
450.000 – 799.000	0	0	0	
800.000-1.149.000	2	10	1.750.000	5,38
1.150.000 -1.499.000	6	30	7.800.000	23,96
1.500.000 -1.849.000	5	25	7.950.000	24,42
1.850.000 -2.199.000	3	15	5.960.000	18,31
Lebih dari 2.200.000	4	20	9.100.000	27,96
Jumlah	20	100	32.550.000	100
Non Pemanfaat				
0 -449.000				
450.000 - 799.000				
800.000-1.149.000	3	100	2.800.000	100
1.150.000 -1.499.000				
1.500.000 -1.849.000				
1.850.000 -2.199.000				
Lebih dari 2.200.000				
Jumlah	3	100		100

Apabila dibandingkan tabel 19 dengan tabel 20 maka dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang mencolok. Peningkatan pendapatan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga jual produksi dan yang paling utama adalah peningkatan jumlah

produksi usaha. Tidak hanya pada pemanfaat, peningkatan pendapatan juga terlihat ada non pemanfaat.

Tabel 21. Pendapatan bersih dan perkapita pemanfaat dan non pemanfaat.

Jumlah Pendapatan Bersih Sebelum PPD (Rp)	Jumlah Pendapatan Bersih Setelah PPD (Rp)	Jumlah Anggota keluarga responden (jiwa)	Pendapatan Perkapita sebelum PPD (Rp)	Pendapatan Perkapita setelah PPD (Rp)
Pemanfaat				
17.830.500	32.550.000	111	160.635	293.243
Non Pemanfaat				
1850.000	2800.000	12	154.167	233.333

Pendapatan perkapita pemanfaat dengan non pemanfaat sebelum PPD tidak berbeda jauh yaitu masing-masing Rp 160.635 dan Rp 154.167 namun setelah PPD perbedaannya jelas terlihat dimana pendapatan pemanfaat menjadi Rp 293.243 sedangkan Non pemanfaat hanya Rp 233.243.

Tabel 22. Hasil uji t sampel berpasangan pendapatan pemanfaat sebelum dengan sesudah PPD

Uraian	Nilai
Rataan selisih antara besar yang Pendapatan sebelum dan sesudah PPD (\bar{D})	735.975
Simpangan baku (Sd)	231.000
Jumlah sampel (n)	20
t-hitung	9,06
t-tabel	1,725

Hasil pengujian secara statistik menggunakan uji beda dua mean sampel berpasangan terhadap peningkatan pendapatan bersih responden sebelum mendapat pinjaman dan setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari Dana Usaha Desa ditunjukkan pada Tabel 22. Secara statistik peningkatan pendapatan responden setelah mendapatkan pinjaman modal dibandingkan pendapatan bersih responden sebelum mendapatkan pinjaman berbeda nyata ($t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$). Hal ini berarti peningkatan pendapatan bersih setelah mendapatkan pinjaman dengan kenaikan yang cukup besar signifikan berbeda dengan pendapatan bersih responden sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dari Dana Usaha Desa. Hal ini sekali lagi

membuktikan bahwa pinjaman modal usaha secara signifikan meningkatkan produktifitas usaha responden yang sekaligus meningkatkan pendapatan bersih untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui usaha mereka sendiri.

4.3.5. Penyempurnaan Strategi Penyaluran Dana Usaha Desa

Penyempurnaan atau membentuk strategi baru Penyaluran Dana Usaha Desa didekati dengan analisis AHP (Analytical Hierarchy Process). AHP adalah salah satu bentuk pengambilan keputusan yang pada dasarnya menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah dalam kelompok-kelompoknya.

Perbedaan mencolok antara AHP dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada jenis inputnya. Model-model yang sudah ada seperti analisa SWOT memakai input yang kuantitatif atau data sekunder. AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap ekspert sebagai input utamanya.

Seiring dengan perkembangan usaha, UED-SP perlu melakukan perubahan-perubahan demi peningkatan ekonomi masyarakat. Secara umum penyaluran dana berjalan dengan baik, sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan program. Namun masih ada beberapa kendala dan perancangan rencana kedepan yang masih perlu jadi perhatian.

Pada dasarnya harapan masyarakat sangat besar kepada keberlangsungan UED-SP dalam rangka peningkatan usaha ekonomi mereka. Selama ini masyarakat sangat kesulitan untuk menjangkau lembaga keuangan, terutama yang memihak kepada mereka.

Perlu disusun strategi penyempurnaan penyaluran dana usaha desa, dalam rangka meningkatkan peran UED SP sebagai salah satu pioneer perekonomian desa, menuju kemandirian desa.

Tabel 23. Rekapitulasi prioritas pelaku dan kendala

Hirarki Pelaku	Nilai	Hirarki Kendala	Nilai
Pemanfaat	0.395	Ketrampilan	1.00
Non Pemanfaat	0.334	Apatisme masyarakat	0.333
		Sosialisasi belum menyentuh seluruh masyarakat	0.333
		Saingan dari BRI	0.333
Pengelola	0.173	Rendahnya profesionalisme	0.292
		Kelengkapan dana operasional	0.177
		Minimnya dana pinjaman	0.296
		Pengetahuan pengelola	0.188
		Dominansi kepala desa	0.047
Pendamping	0.036	Belum ada payung hukum	1.00
Pemerintah	0.062	Kesejahteraan pendamping	1.00

4.3.5.1. Pemanfaat

Pemanfaat adalah masyarakat yang menjadi anggota UED sekaligus memanfaatkan dana pinjaman untuk pengembangan usaha. Diskusi secara ad hoc yang dilakukan hanya menempatkan satu level kendala yaitu kurangnya kerampilan pemanfaat sehingga berujung pada lemahnya potensi untuk pengembangan usaha, termasuk kedalamnya pengetahuan tentang pasar.

4.3.5.2. Masyarakat atau non pemanfaat

Apatisme masyarakat merupakan kendala yang ditemukan dilapangan. Hal memiliki nilai prioritas yang sama (L: 0,333) dengan adanya saingan dari BRI dan kurangnya sosialisasi. Untuk saingan dari BRI, hal ini dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang mengetahui bahwa sebagian dari mereka lebih memilih mengajukan usulan pinjaman kepada bank tersebut karena memiliki suku bunga yang sama dan pencairannya lebih cepat. Selain itu masyarakat juga merasakan kurangnya sosialisasi terutama tentang kemudahan pinjaman melalui UED-SP.

4.3.5.3. Pengelola

Profesionalisme pengelola menjadi sorotan utama setelah kurangnya dana pinjaman (L:0,296). Hal ini dapat dilihat dengan kurang jelasnya pembagian tugas sehingga ada beberapa bagian yang tumpang tindih dan saling lempar tanggung

jawab. Pengetahuan pengelola (L:0,188) juga harus ditingkatkan untuk menyongsong pengembangan usaha selanjutnya dan juga dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada pemanfaat dan masyarakat. Kelengkapan operasional tidak kalah menjadi perhatian dibanding yang lain (L:0,188) dan menempatkan kendala ini pada prioritas ke tiga.

Peran kepala desa sangat berpengaruh dalam penyaluran dana program ini, sehingga merupakan salah satu indikator minus dalam proses pemberdayaan, namun demikian kendala ini diletakkan pada prioritas terakhir (L: 0,045).

4.3.5.4. Pendamping desa

Khusus pendamping desa Rambah Muda merupakan pendamping terbaik tingkat Provinsi Riau, ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas pendamping. Disisi lain, kesejahteraan pendamping perlu diperhatikan mengingat sulitnya wilayah kerja dan besarnya jasa yang diberikan.

4.3.5.5. Pemerintah

Dalam proses pemberdayaan peran pemerintah dicoba untuk dikurangi sehingga dapat menumbuhkan tri guna pembangunan yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Dibelakang itu justru ada bagian tertentu yang harus difasilitasi pemerintah terutama dalam perancangan payung hukum UED-SP.

Tabel 24. Rekapitulasi nilai prioritas strategi penyempurnaan

Strategi	Nilai	Rangking
Pelaksanaan Pelatihan training berkala	0,185	2
Menggerakkan Struktur Organisasi	0,139	3
Berdayakan Aparat desa dan tokoh masyarakat	0,187	1
Usulan dana yang tidak mengikat	0,122	5
Kerjasama dengan PT.PER	0,149	4
Buat Perda UED-SP & Bum-Des	0,080	7
Berdayakan PD sebagai agen sinergitas program di desa	0,045	8
Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah	0,093	6
Jumlah	1	

Analisa dengan bantuan expert choice menempatkan strategi berdayakan aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi prioritas paling utama (L: 0,187). Masyarakat menilai peran tokoh masyarakat belum maksimal, terutama dalam koordinasi. Optimalisasi ketua RT dan RW perlu ditingkatkan lagi, sehingga kedepan

diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang apatis dan merasa takut memanfaatkan dana pinjaman.

Prioritas selanjutnya adalah Pelaksanaan pelatihan training berkala (L:185). Masyarakat Rambah Muda tergolong rajin dan ulet, namun tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik, sehingga jalannya roda usaha tidak berjalan secara optimal. Pelatihan telah pernah dilakukan didesa ini. Masyarakat menyambut dengan baik, hasilnya belum terasa cukup. Jenis pelatihan yang diharapkan antara lain Kewirausahaan, teknologi tepat guna maupun usaha tani.

Dalam rangka menanggulangi kekurangan pinjaman, saat ini telah dilakukan persiapan kerjasama dengan PT.PER (permodalan Ekonomi Rakyat). Strategi ini ditempatkan pada prioritas ke-3 (L:0,139). Selanjutnya usulan dana yang tidak mengikat menjadi prioritas dibawahnya (L:122). Sumber dana yang akan diusahakan adalah bantuan dari pemerintah daerah. Hal yang cukup menarik adalah UED-SP akan menjadikan lomba UED-SP terbaik tingkat provinsi sebagai sumber dana bagi pengelolaan. Karena dari pengalaman sebelumnya hadiah untuk pemenang lomba ini cukup tinggi.

Membuat Perda UED-SP & Bum-Des menjadi prioritas selanjutnya (L:0,080). Hal ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran UED-SP kedepan. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pengelola, baik dengan koordinasi dengan fasilitator PPD maupun lainnya, apalagi nanti setelah adanya penambahan modal melalui kerjasama dengan PT.PER.

Pendamping desa Rambah Muda terpilih sebagai pendamping terbaik tingkat Provinsi Riau, dan tentunya telah memenuhi perannya sebagai seorang fasilitator di tingkat desa dengan baik. Namun untuk kedepan, dengan semakin berkembangnya UED-SP diharapkan pendamping dapat menjadi sebagai agen sinergitas program di desa. Misalnya sebagai fasilitator penghubung masyarakat dengan birokrasi.

Salah satu tujuan PPD adalah munculnya kemandirian masyarakat. Sehingga tidak salah bahwa koordinasi dan sinergi dengan pemerintah ditempatkan pada proritas terakhir (L:0,093).